

Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Feebase (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang KCU Margonda Depok)

Oleh: M. Imam Sundarta dan Ade Retno Nuraeni

Abstrak

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara penerapan prinsip tata kelola perusahaan (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit dalam perusahaan.

Corporate Governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dimana terdapat lima prinsip-prinsip Good Corporate Governance yakni : keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Apakah prinsip-prinsip good corporate governance terhadap prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan ? dan Apakah Good Corporate Governance dapat berpengaruh terhadap prosedur pemberian kredit ?

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuisioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara penerapan GCG terhadap prosedur pemberian kredit. Hasil penelitian ini mendorong dan memotivasi perusahaan agar prinsip GCG dijadikan sebagai berdaya perusahaan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Prosedur Pemberian Kredit, Feebase

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian

Krisis yang melanda pada pertengahan 1997 membuat perekonomian Indonesia tidak stabil. Kondisi ini diperparah

dengan rendahnya corporate governance.

Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga control public menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang

saham besar pada beberapa keluarga yang menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik ditambah lagi globalisasi yang sedang terjadi saat ini mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam bidang sosial politik dan ekonomi, Oleh karena itu diperlukan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada setiap sektor perekonomian di Indonesia agar dapat menjaga kelangsungan demi meningkatkan perekonomian indonesia.

Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enton, Tyco, Worldcom, Maxwell, Polypeo dan lain-lain. Oleh karena itu saat ini isu good corporate governance menjadi sangat penting. Keruntuhan perusahaan-perusahaan public tersebut dikarenakan

oleh strategi, prosedur maupun praktik curang (fraud) dari manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.

Menurut penelitian Jhonson dkk (2000) salah satu penyebab krisis ekonomi pada negara-negara di asia pada tahun 1997 adalah karena lemahnya praktek-praktek good corporate governance pada wilayah tersebut. Iskandar Chamlou (2000) juga menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi dikawasan asia tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya corporate governance yang ada di negara-negara tersebut sehingga mereka masuk ke dalam peringkat krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti lemahnya enforcement hukum, standar akuntansi, dan pemeriksaan keuangan yang belum mapan, pengawasan komisaris dan terabaikannya hak minoritas.

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara. Implementasi good corporate governance pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi, Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perannya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan karena belum diimplentasikannya good corporate governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya

dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yakni: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan good corporate governance, pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan di dalam penerapan good corporate governance merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998 (Husna, 2001).

Pelaksanaan good corporate governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Tantangan terkini yang dihadapi karena prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance masih belum dipahami secara luas oleh

komunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri,2005).

Pada masa sekarang banyak masalah yang dihadapi oleh pihak bank terutama yang menyangkut kondisi keuangan dikarenakan kurangnya penerapan prinsip good corporate. Masalah yang sering muncul adalah kredit bermasalah, bahkan ada kredit yang menjadi macet sehingga harus diputihkan dan mengakibatkan berkurangnya feebase.

Manajemen kredit merupakan cara pengelolaan kredit yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada kredit lunas. Sedangkan tujuan utama dari manajemen kredit adalah meningkatkan penjualan yang menguntungkan bagi perusahaan, dengan cara memberikan kredit kepada langganannya dengan layak, dengan melakukan analisis informasi kredit yang telah diberikan sebelumnya. Dalam

pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan lain sebagainya.

Adapun prosedur pembelian kredit pada PT. Bank Central Asia Tbk, dimulai dari permohonan kredit, yaitu calon debitur melakukan permohonan kredit dengan mengisi formulir aplikasi kemudian pihak bank melakukan analisis dan evaluasi terhadap resiko kredit yang dilakukan oleh pejabat kredit terhadap nasabah selanjutnya setelah melakukan analisis kredit maka pejabat bank melakukan negosiasi kredit dengan pemohon untuk mencapai

kesepakatan mengenai jumlah, struktur, dan tipe kredit, kelengkapan dokumen serta syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi pemohon dan kemudian memberikan putusan kredit apakah nasabah telah memenuhi semua syarat-syarat dan layak untuk mendapatkan kredit atau dana kredit dicairkan atau diberikan kepada nasabah setelah prosedur dipenuhi.

2. Rumusan masalah

2.1. Apakah prinsip-prinsip good corporate governance terhadap prosedur

pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan ?

2.2. Apakah Good Corporate Governance dapat berpengaruh terhadap

prosedur pemberian kredit ?

3. Tujuan dan manfaat penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

3.1. Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar rujukan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas bagian kredit khususnya dalam hal pemberian kredit, untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan perusahaan.

3.2. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas khususnya dalam meningkatkan feebase dibagian kredit PT Bank Central Asia Tbk dan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

4. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini mempergunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

4.1. Kuisisioner merupakan suatu lembar isian yang didalamnya berisi pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang berhubungan dengan penelitian. Kuisisioner yang digunakan termasuk kedalam jenis skala likert (pertanyaan yang menunjukkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan responden).

4.2. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung pada bagian yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada meliputi: laporan keuangan konsolidasi mengenai kredit yang diberikan, buku-buku atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan masalah dalam penulisan ini.

5. Istilah dan landasan teori.

5.1 Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. (pasal I ayat 2 UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998.)

5.2 Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007) "bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksanaan lalu lintas

pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

5.3 Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran. (PSAK No.31 tentang akuntansi perbankan (IAI:2000:1))

5.4 Kredit adalah kemauan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati (Astiko (1996:5))

5.5 Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk (Wahyudin:2008).

II. PEMBAHASAN

Adapun uraian argument penelitian ini akan dibahas dalam berikut ini.

1. Bank BCA

Sejak berdirinya Bank BCA telah bekerja keras untuk menciptakan tim manajemen yang kuat dan professional serta ditambah lagi dengan diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance yang telah diakui secara internasional. Bank BCA disupervisi oleh dewan komisaris yang dipilih berdasarkan anggota komunitas keuangan.

Dari data yang diperoleh penulis manajemen eksekutif tertinggi Bank BCA adalah dewan direksi yang dipimpin oleh direktur utama.

Bank BCA juga memiliki beberapa komite yang menunjang berjalannya operasional perusahaan yaitu Komite Aset dan Liability, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Manajemen Resiko, Komite Pengarah Teknologi, dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian. Bank BCA juga memiliki tiga komite yang melakukan

pengawasan atas keseluruhan operasional perusahaan dan melakukan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Audit. Fokus utama strategi BCA adalah pada pertumbuhan kualitas penyaluran kredit, dan efisiensi memungkinkan Bank untuk mencapai pertumbuhan berkualitas tinggi dan meningkatkan perannya sebagai bank transaksional yang menyediakan layanan penyelesaian pembayaran dalam mendukung tercapainya perekonomian Indonesia yang kuat dan tujuan pembangunan nasional.

Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara dan dokumen, adapun tugas pokok komite-komite yang mengawasi dan menunjang operasional perusahaan dan prosedur pemberian kredit di bank BCA dalam penerapan prinsip-prinsip GCG :

1.1. Komite Audit :

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap penerapan tata kelola perusahaan, yang difokuskan kepada pengawasan atas :

- a. Kepatuhan perseroan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b. Keandalan
- c. Efektivitas dan efisiensi operasional perseroan, dengan menitikberatkan pada pengelolaan data.
- d. Evaluasi fungsi audit internal sejak perencanaan, pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil-hasilnya, termasuk menghadiri pembahasan hasil

hasil audit apabila dipandang perlu.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut komite audit membuat rencana kegiatan tahunan yang dapat menjawab, mendalami, dan

memberi keyakinan bahwa tata kelola perusahaan telah berjalan dengan integritas tinggi dan andal. Komite audit

juga menjalani hubungan kerja yang efektif dengan direksi, divisi audit internal, dan auditor eksternal maupun pihak terkait lainnya.

1.2. Komite Pemantau Resiko Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dewan komisaris dalam hal keberadaan, operasi dan efektivitas program pengelolaan risiko BCA, kebijakan dan praktik-praktik, termasuk dan tidak terbatas pada kepatuhan atas kebijakan Bank Indonesia terkait implementasi Basel II. Selain itu, komite pemantau risiko juga bertugas dalam memberi masukan atau rekomendasi atas toleransi risiko BCA dan memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

1.3. Komite Remunerasi dan Nominal

Tugas dan Tanggung Jawab

Misi komite remunerasi dan nominal adalah untuk mengembangkan kualitas manajemen melalui kebijakan remunerasi dan nominasi. Misi tersebut diwujudkan melalui kebijakan remunerasi dan nominal. Misi tersebut diwujudkan melalui tugas dan tanggung jawab pokok. Komite remunerasi dan nominasi sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominal perseroan.
- b. Merekomendasikan kepada dewan komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai

secara keseluruhan untuk kemudian oleh dewan komisaris disampaikan kepada direksi.

c. Menyusun dan merekomendasikan kepada dewan komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

d. Memastikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan peraturan bank indonesia.

e. Merekomendasikan kepada dewan komisaris mengenai calon anggota dewan komisaris dan/atau direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota komite audit dan komite pemantau risiko kepada dewan komisaris.

1.4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

KPTI, yang sebelumnya disebut komite teknologi informasi, dibentuk untuk meningkatkan keunggulan bersaing

perusahaan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Berikut adalah fungsi pokok KPTI :

a. Melakukan review dan memberikan rekomendasi rencana strategi TI

agar sejalan dengan rencana bisnis BCA.

b. Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA.

c. Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada perusahaan.

1.5. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP dibentuk untuk mengarahkan perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pemcapaian target perkreditan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Komite tersebut berfungsi sebagai komite penasihat direksi yang bertugas antara lain memantau serta mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta melakukan kajian berkala terhadap kebijakan dasar

perkreditan BCA. Komite tersebut membuat laporan atas risalah rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 1 tahun.

1.6. Asset & Liability Committe (ALCO)

ALCO berfungsi antara lain untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas sejalan dengan kebutuhan likuiditas bank dan meminimalisasi idle funds. Selain itu ALCO menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga serta strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga sehingga dapat dicapai tingkat marjin bunga bersih (net interest margin) yang optimun. Komite tersebut melaporkan realisasi kerjanya melalui risalah rapat rutin dan khusus yang diadakan untuk membahas hal tersebut. Komite tersebut mengadakan rapat minimum sekali dalam 1 bulan.

1.7. Komite Kredit

Dibentuk untuk membantu direksi dalam mengevaluasi dan atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Fungsi pokok komite kredit adalah :

- a. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- b. Memberikan rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- c. Melakukan koordinasi dengan Asset & Liability Committe (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit terutama untuk debitur korporasi dan komersial.

8. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

KPKK dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada direksi mengenai penyelesaian kasus kepegawaian melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pegawai/karyawan. Dengan adanya rekomendasi tersebut maka keputusan direksi yang diambil dapat memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan. KPKK dapat memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus-kasus menyangkut kepegawaian. Komite tersebut melaporkan realisasi kerjanya melalui risalah rapat rutin dan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

9. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR dibentuk untuk menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta menyempunakan pelaksanaan

manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif dan menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Pertanggungjawaban komite dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala minimal 3 bulan sekali kepada direksi. Sedangkan mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu, juga dilaporkan kepada direksi secara tertulis.

Untuk menghadapi kegiatan operasional perbankan yang semakin kompleks, bank-bank dituntut untuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menjamin keberlangsungan usaha. Komitmen untuk memenuhi standar tertinggi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan salah satu unsur utama yang mendasari ketangguhan BCA dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa krisis pada tahun-tahun sebelumnya. BCA telah diterapkan

dengan baik di seluruh jenjang organisasi termasuk terus meningkatkan fungsi intermediasinya dengan fokus pada strategi pendanaan dan pemberian kredit.

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Bank BCA

Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di bank BCA antara lain:

2.1. Keterbukaan (Iransparency)

2.1.1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.

2.1.2. Informasi tersebut meliputi visi, misi, sasaran usaha,, strategi bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali) cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan

fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan modal.

Prinsip keterbukaan itu tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Bank BCA menyampaikan lapora kepada bank indonesia, badan pengawasan pasar modal lembaga keuangan (BAPEPAM-LK), bursa efek jakarta dan bursa efek surabaya, serta mengumumkan kepada public mengenai terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta materiall yang dapat mempengaruhi harga tau niali efek atau keputusan investasi pemodal secara tepat waktu dan obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PBI No.8/4/PBII2006 tentang pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi bank umum beserta perubahannya PBI No.8/14IPBII2006 tentang perubahan atas PBI No.8/4/PBII2006 mewajibkan BCA untuk melaporkan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku di mulai peftama kali untuk posisi laporan akhir Desember.

2.2. Akuntabilitas (Accountability)

2.2.1. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi bank serta menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggungjawab masing-masing.

2.2.2. Dalam pengelolaannya, bank menetapkan check and balance system.

2.2.3. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki reword and punishment system.

2.2.4. Bank meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG.

2.3. Tanggung Jawab (Responsibility)

2.3.1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.3.2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

2.4. Independensi (Independency)

2.4.1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder"r manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.

2.4.2. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

2.5. Kewajaran (Fairness)

2.5.1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.5.2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

3. Prosedur Pemberian Kredit pada PT.

Bank Central Asia Tbk

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang besar dalam menunjang keberhasilan berbagai program pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. PT Bank Central Asia Tbk sebagai salah satu bank umum dalam hal ini telah merespon keinginan para nasabahnya yakni bukan saja bank yang hanya mengumpulkan dana dan menerima simpanan masyarakat dalam tabungan, deposito, dan giro tetapi juga

sebagai lembaga keuangan yang memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

Memperhatikan peranan perbankan yang sedemikian strategis dalam mencapai tujuan nasional dan sebagai intermediasi dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta dilihat dari sumber pendapatan utama bank, dimana sumber pendapatannya adalah dari pemberian kredit, dengan demikian dalam pemberian kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan prosedur perkreditan yang sehat untuk menghindari masalah di dunia perbankan antara lain kredit kurang lancar atau kredit macet.

Kredit macet adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atas kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembiayaan bunga dan pokok pinjaman. Oleh karena itu,

tidaklah mengherankan banyak bank di Indonesia, baik bank pemerintah maupun bank swasta menerapkan aturan kredit tersendiri, peraturan yang berlaku dalam menyalurkan dana atas pinjaman berupa kredit kepada debiturnya. Semua ini dilakukan pihak bank untuk mengamankan bisnis bank tersebut dari bahaya kredit macet.

Sistem pemberian kredit yang terdiri atas beberapa prosedur secara hierarki dan terstruktur, dimana setiap prosedur terdiri atas langkah-langkah yang konkrit sebagai wujud nyata dari sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan, adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh bank BCA sebagai berikut :

3.1. Permohonan Kredit

a. Calon debitur mengisi formulir aplikasi permohonan kredit konsumen yang telah disediakan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

b. Setelah menerima permohonan beserta lampirannya tersebut petugas cabang melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran pengisian

dananya, apabila masih ada yang belum lengkap agar dimintakan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan masih belum juga dilengkapi maka permohonan kredit tersebut ditolak dengan memberikan alasan secara bijaksana.

c. Sentra kredit konsumen/KCU (termasuk capem/kantor kas) setelah menerima permohonan kredit beserta persyaratan dan kelengkapan data pemohon, selanjutnya melakukan analisa kredit yang didasarkan pada hasil kunjungan dan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh pemohon serta memintakan informasi BI untuk pemohon kredit.

d. Sentra kredit konsumen/KCU (termasuk capem/kantor kas) agar meneliti secara seksama kontinuitas perusahaan tempat pemohon bekerja mengingat kredit konsumtif umumnya berjangka panjang.

e. Sebelum kredit diberikan, petugas kredit wajib melakukan verifikasi atas kebenaran data pemohon dan informasi lainnya.

f. Setelah dilakukan verifikasi secara lengkap, pemohon kredit diproses dengan sistem scoring.

g. Analisa pemberian kredit untuk pemohon yang telah menjadi debitur produktif bank BCA yaitu KI (kredit investasi) dan/atau KMK (kredit modal kerja) maupun nondebitur adalah menggunakan sistem scoring kredit konsumtif.

3.2. Analisis dan Evaluasi Kredit

a. Kredit yang akan diproses harus diadakan penyidikan dan analisis tertulis oleh pejabat pemrakarsa.

b. Apabila pejabat kredit melakukan setiap permohonan kunjungan ke nasabah, maka data LKN (laporan kunjungan nasabah) diserahkan kepada petugas administrasi kredit untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam data pemohon atau calon debitur.

c. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.

d. Dari data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat resiko kredit untuk kemudian menuangkan hasilnya dalam formulir penilaian tingkat risiko kredit untuk kemudian menuangkan hasilnya dalam formulir penilaian tingkat risiko kredit.

e. Selain dilakukan penelitian CRR serta disimpulkan bahwa proses kredit dapat diteruskan, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisis dan evaluasi kredit yang dituangkan dalam suatu memorandum analisis kredit.

f. Hasil analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam memorandum analisis resiko (MAR) oleh pejabat yang ditunjuk.

3.3. Negosiasi Kredit

a. Setelah melakukan analisis dan evaluasi maka pejabat pemrakarsa perlu melakukan negosiasi dengan pemohon untuk mencapai kesempatan mengenai jumlah, struktur dan tipe kredit, kelengkapan dokumen serta syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi pemohon.

b. Negosiasi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses kredit sesuai dengan keperluan analisis, dengan menggunakan berbagai sarana antara lain telepon, faksimili, e-mail. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk notulen atau

langsung dimasukkan dalam MAK(memorandum analisis kredit) atau catatan lainnya.

3.4. Penetapan Struktur dan Tipe Kredit

a. Berdasarkan hasil kesimpulan analisis, evaluasi serta negosiasi, dapat ditetapkan struktur dan tipe kredit serta ketentuannya (jangka waktu, ciri dan td,ran pengguna kredit).

b. Pada intinya struktur dan tipe kredit terdiri atas :

- 1) Identitas pemohon
- 2) Jumlah pinjaman
- 3) Sumber pembiayaan atau dana
- 4) Jenis pinjaman, jangka waktu, bunga, denda
- 5) Keperluan
- 6) Syarat-syarat kredit lainnya

3.5. Rekomendasi Pemberian Putusan Kredit

a. Setelah pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi kredit maka pejabat yang bersangkutan meng-up date status aplikasi pinjaman.

b. Untuk permohonan kredit yang direkomendasikan setuju, maka AO meng-up date status pinjaman sesuai pada MAK.

c. Kemudian pejabat pemrakarsa meneruskan paket permohonan kredit pada pejabat pemutus melalui ADK (administrasi kredit) KCU.

d. ADK mencatat tanggal penerimaan berkas dari pejabat pemrakarsa dalam register permohonan kredit KCU yang kemudian, meneruskan paket kredit tersebut kepada pemutus.

3.6. Pemberian Putusan Kredit

a. Pejabat pemutus penerima paket kredit berikut formulir PTK dari pejabat pemrakarsa melalui ADK, dan selanjutnya memberikan putusan atas permohonan kredit dimaksudkan dengan menandatangani formulir PTK.

b. Setelah kredit diputus ADK mencatat pada register putusan kredit.

c. Kemudian ADK menyiapkan surat penolakan atau penawaran putusan kredit dan menyampaikan pada pemohon.

3.7. Pencairan Kredit

a. Ketentuan

1) Pencairan kredit dilakukan setelah formulir instruksi pencairan kredit (IPK) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pimpinan.

2) ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam register permohonan kredit KCU.

b. Syarat Penerbitan IPK

1) Surat perjanjian kredit dan surat perjanjian aksesoir yang mengikutinya telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah dan telah diterima keabsahannya (termasuk dokumen aslinya), serta memastikan bahwa

seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi Bank BCA.

3) Semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon, baik secara tunai maupun overbooking selama bukan dari rekening kredit yang diputus.

4. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Prosedur Pemberian Kredit PT bank Central Asia Tbk.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh data penyaluran kredit Bank BCA yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Dan hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank BCA oleh karena tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank BCA berjalan dengan sangat baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BCA yang juga sangat baik.

Tabel 4.1

Kredit - Gross

(dalam miliar Rupiah)

Tahun	Kredit
20t0	r53923
20r1	202.2s4
2012	256.177
2013	312.290
20t4	346.563

Sumber: Bank Central Asia,2015

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel dimensi-dimensi dalam pemberian kredit. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS/or windows versi 16. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS dijelaskan pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	
1	(Constant)	10.822	3.653		2.962	.007				
	Transparansi	.656	.379	.269	1.730	.046	.801	.333	.104	
	Akuntabilitas	2.272	.345	1.188	6.592	.000	.912	.803	.396	
	Pertanggungjawaban	1.529	.768	.503	1.990	.050	.861	.376	.119	
	Kewajaran	1.035	.253	.373	4.096	.000	.321	.641	.246	
	Kemandirian	1.717	.396	.763	4.337	.000	.784	.663	.260	

a. Dependent Variable: Kredit

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,822 + 0,656X_1 + 2,272X_2 + 1,529X_3 + 1,035X_4 + 1,717X_5 + 2,27$$

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima, Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,0822 - 0,656X_r + 2,272X_z - 1,529X_z - 1,035X_q + 1,717X_s$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa koefisien dari persamaan regresi adalah positif. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penyebaran kuisioner yang mengungkapkan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap prosedur pemberian kredit dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank BCA berusaha menciptakan usaha yang bersih dan sehat dengan berusaha menekan perilaku fraud pada prosedur pemberian kredit yang diterapkan di perusahaan tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Hasil yang di dapat oleh Bank BCA dengan penerapan tersebut meningkatnya angka jumlah penyaluran kredit yang dapat

dilihat dari laporan keuangan konsolidasi BCA.

2. Hasil analisis regresi diperoleh bertanda positif bertanda bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap pemberian kredit dapat diterima.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Astiko. 1996. Manajemen Perkreditan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Bank Indonesia. 2014. Booklet Perbankan Indonesia. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Bank, World. 2A05. Corporate Governance Country Assessment. Republic of Indonesia, Jakarta.
- Daniri. 2014. Lead by GCG. Gagasan Bisnis Indonesia, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2007. Perbankan. Burni Aksara, Jakarta.
- Jhonson Simon, P. Boone, A. Breach, dan E. Friedman. 2000. Corporate

- Governance In Asion Financial Crisis. Journal of Financial Economic j& hal. 141-186.
- Kasmir. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rajar, vali Pers, Jakarta.
- M, Sinungan. 1989. Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit. PT Bina Aksara Jakarta.
- Moeljono, Djokosantoso. 2005. Good Corporate Culture Sebagai inti dari Good Corporate Governance. ElexMedia Komputindo. Jakarta.
- Moh, Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBII20a3. Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum. Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI12006. Pelaksanaan Good Corporate governance Bagi Bank Umum, Indonesia.
- PSAK Nomor 31 Revisi Tahun 2000 Tentang Perbankan, ayat 1.
- Sujarweni. 2014. V Wiratna. SPSS untuk Penelitian. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Suyatno, Chalik, Sukad, Ananda, Marala. 1995. Dasar-Dasar Perkreditan. Gramedia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1, ayat 2.
- M. Imam Sundarta dan Ade Retno Nuraeni dari Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor